

Buletin Parlementaria

Nomor 1213/IV/VIII/2022 • Agustus 2022

Kekuatan Gotong Royong Merupakan Jiwa Kepribadian Bangsa Indonesia Hadapi Pandemi Covid-19



3 **Jadi Agenda
Strategis Nasional,
DPR Dukung
Pembangunan Ibu
Kota Nusantara**



5 **Presiden Apresiasi
DPR Dukung
Transformasi Besar
Pemerintah**



9 772614 339005



Kekuatan Gotong Royong Merupakan Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia Hadapi Pandemi Covid-19



Pimpinan DPR RI bersama Presiden dan Wakil Presiden RI menuju Ruang Rapat Paripurna.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi seluruh anak bangsa yang telah membantu rakyat dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Keberhasilan Bangsa Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 ini merupakan berkat kerja bersama dan gotong royong Bangsa Indonesia.

"Keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 membuktikan kemampuan kekuatan gotong royong, kerja bersama, saling bantu-bantu, *holopis kuntul baris*, yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia," ujar Puan saat menyampaikan pidato dalam

Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Puan menyebut, dalam rilis data Johns Hopkins University terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2021, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam menangani Covid-19. "Inilah hasil kerja bersama kita, gotong royong melawan pandemi Covid-19," kata mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.

Pemerintah pun telah diberikan ruang kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan cepat dan antisipatif demi keselamatan

rakyat dan memastikan jalannya pemerintahan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah pengganti UU tentang Penanganan Pandemi Covid-19 diproses secara cepat dan cermat di DPR RI sehingga tidak terjadi kekosongan payung hukum untuk menangani pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia.

Apresiasi secara khusus diberikan kepada seluruh anak bangsa yang telah berada di garis terdepan untuk membantu rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Terima kasih kepada tenaga Kesehatan dan medis, terima kasih TNI, terima kasih Satgas Covid-19 di pusat dan daerah, serta terima kasih para relawan kemanusiaan," tutur politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan menambahkan, Pancasila menjadi kekuatan nasional yang paling utama dalam menjaga kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Meninggalkan Pancasila sama halnya mencabut jati diri bangsa dari akar terdalamnya dan mengkhianati amanat para Pendiri Bangsa. Mengganti Pancasila akan berdampak pada hilangnya karakter sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan bergotong royong," tutup Puan.

Sebelum Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar, terlebih dulu digelar Sidang Tahunan MPR RI yang dipimpin Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI ini dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-11 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono, Pimpinan dan Anggota MPR-DPR-DPD RI, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, ketua umum partai politik serta duta besar negara sahabat. ● gal/sf



Jadi Agenda Strategis Nasional, DPR Dukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan DPR RI memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Sebagai bagian dari agenda strategis nasional, tidak hanya sebagai simbol identitas nasional, ia berharap IKN turut menjadi pusingan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

"Kami, DPR RI, memberikan dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Negara. Kami pun berharap Ibu Kota Negara, Nusantara, diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan,

menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia," tutur Puan saat menyampaikan pidato pada Sidang Bersama DPR RI-DPRD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dirinya menekankan IKN telah menjadi amanat yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan, tahapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus. Sehingga, ia menegaskan agar seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa turut mendukung terciptanya IKN.

Selain itu, Puan menjelaskan harus diperkuat dengan sokongan perencanaan hingga manajemen sumber daya yang baik. Tanpanya, IKN tidak akan bisa menjadi pendorong pemerataan pembangunan nasional. "Agar dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara, sebagai agenda kita bersama, IKN dapat membangun ekonomi Indonesia masa depan dan (menjadi) momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional," tandas politisi PDI-Perjuangan tersebut. • **ts/sf**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Wiryanan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firista Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitomput, Zulfirik Mubien

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciiani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Buka Masa Sidang 2022-2023, Puan Maharani Ungkap DPR Sudah Rampungkan 43 UU dalam 3 Tahun



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Puan menyampaikan berbagai hasil kinerja DPR periode 2019-2024 yang sudah berjalan selama tiga tahun. Masa sidang ini memasuki tahun keempat dari periode 2019-2024 masa jabatan DPR RI dan Presiden-Wapres.

"Menjadi suatu kesempatan yang semakin mendesak dalam menuntaskan secara bertahap sejumlah permasalahan struktural dalam pembangunan nasional," kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2022-2023, di

Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Rapat Paripurna DPR ini digelar usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin hadir untuk menyampaikan secara langsung RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR RI.

Puan menyampaikan sejak tahun 2019 hingga saat ini, sejumlah undang-undang (UU) yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah berjumlah 43 UU. "Dari 43 undang-undang itu, sebanyak 32 UU diselesaikan di masa sidang 2021-2022 atau dalam kurun waktu satu tahun. Dengan kata

lain, sejak 16 Agustus 2021 hingga 15 Agustus 2022, DPR RI mampu merampungkan pembahasan 32 Undang-undang," kata Puan.

Puan pun merinci UU yang telah disahkan berdasarkan alat kelengkapan dewan (AKD) bersama Pemerintah. Komisi I DPR menyelesaikan 2 UU, Komisi II DPR 16 UU, Komisi III DPR 4 UU, Komisi V DPR 1 UU, Komisi VI DPR 3 UU, Komisi VII DPR 1 UU, Komisi X DPR 2 UU, Komisi XI DPR 4 UU, Badan Legislasi (Baleg) DPR 6 UU, Badan Anggaran (Banggar) DPR 1 UU, dan Panitia Khusus (Pansus) DPR menyelesaikan 3 UU.

"Pembentukan UU merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama antar pembentuk UU, yaitu DPR RI dan Pemerintah, dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional," sebut politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan menambahkan kinerja dalam pembentukan UU merupakan kinerja bersama antara DPR RI dan Pemerintah. Dalam pembahasan RUU, kata Puan, DPR dan Pemerintah dituntut agar selalu cermat. "Serta mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional, serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Pembentuk UU juga dituntut agar pembahasan UU dilakukan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip transparansi publik," ungkap Puan. • [rnm,ann/sf](https://www.rnm.ann/sf)





Presiden Apresiasi DPR Dukung Transformasi Besar Pemerintah



Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan Anggota MPR RI-DPR RI-DPD RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI yang telah mendukung beberapa transformasi besar pemerintah. Di antaranya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta UU Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato

Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

"Pembangunan IKN harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor pemerintah, tetapi juga

motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang berpartisipasi," jelas Presiden kepada di hadapan Anggota MPR-DPR-DPD RI.

Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa Indonesia harus senantiasa waspada, hati-hati, dan siaga. Mengingat, krisis demi krisis masih menghantui dunia serta geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Maka, Presiden mengingatkan seluruh elemen nasional harus selalu '*Eling lan Waspada*' yang bermakna harus ingat dan waspada.

Lebih lanjut Presiden Jokowi mengajak seluruh pihak harus selalu cermat dalam bertindak serta harus selalu hati-hati dalam melangkah. Presiden kembali menegaskan agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Presiden meminta langkah-langkah besar harus terus dilakukan terlebih ada minimal 5 agenda besar nasional. Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju.

"Dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita, dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan '*Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat*', Aamiin YRA. Marilah kita bersatu padu, untuk Indonesia Maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka!" pungkas Presiden Jokowi. ● pun/sf

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Terima Nota Keuangan 2023, DPR Minta Insentif Pajak Dipertajam Demi PEN



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menerima Pengantar RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo. Ia berharap, pelaksanaan APBN 2023 dilaksanakan secara cermat dan efektif. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2023.

Penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023

Beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Jokowi dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 DPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Lewat pembahasan tersebut, jelas Puan, asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen dan laju inflasi pada kisaran 2 persen hingga 4 persen. Kemudian pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19 persen PDB hingga 12,24 persen PDB, dengan pendapatan perpajakan sebesar 9,3 persen PDB hingga 10 persen PDB. Lalu belanja negara sebesar

13,8 persen PDB hingga 15,1 persen PDB, serta defisit berada pada besaran 2,61 persen PDB hingga 2,85 persen PDB.

Tema Rencana Kerja Pemerintah pada Tahun 2023, yaitu 'Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan'. Sementara arah kebijakan fiskal, lanjut Puan akan difokuskan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Puan pun memberi catatan mengenai rencana kerja Pemerintah dan arah kebijakan fiskal tersebut.

"Pemerintah agar telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, APBN 2023 perlu mengantisipasi berbagai hal yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN. Khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui SBN. Mulai dari dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya.

"APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3 persen PDB. Sehingga menempatkan Pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas," tutur Puan. ● [rnm,ann/sf](#)



Penyelenggaraan P20 Jadi Momentum Perkuat Kolaborasi Hadapi Tantangan Global



FOTO: KRESNO/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya



Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2022-2023.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam pertemuan G7 dan pemimpin-pemimpin negara yang sedang berkonflik beberapa waktu lalu. Menurut Puan, langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"DPR RI sendiri akan ikut berperan dalam menyukseskan Presidensi Indonesia di G20. Penyelenggaraan P20, yang merupakan forum ketua parlemen negara-negara G20, akan menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan global pada masa yang akan datang," kata Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar

di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Puan menyampaikan, pertemuan P20 dengan tema 'Stronger Parliament for Sustainable Recovery' yang akan berlangsung pada Oktober mendatang dinilai sejalan dengan tema Presidensi G20, yaitu 'Recover Together, Recover Stronger'. Dalam P20 akan dibahas empat isu prioritas yakni soal akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta tantangan ekonomi, kemudian mengenai parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, hingga terkait inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Menurut Puan, keempat isu tersebut sangat relevan dalam rangka pemulihan global pasca Pandemi Covid-19. Termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan aktual global yang dihadapi saat ini. "DPR RI akan memberikan perhatian

dan fokus pada isu ketahanan pangan, yang menjadi bagian dari isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau," terang Puan.

Lebih lanjut, hasil dari P20 diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong adanya aksi nyata dalam merespons berbagai masalah global. "Kesepakatan P20 merupakan wujud komitmen bersama bahwa kita berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman, kita berusaha membangun suatu dunia, di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai," urai Puan.

"Kita berusaha membangun suatu dunia, di mana terdapat keadilan dan kesejahteraan untuk semua orang. DPR RI akan mendorong parlemen negara anggota P20 untuk terus melakukan kerja sama, sehingga dapat mencapai target yang diharapkan melalui kepemimpinan Indonesia pada P20," tandas Puan. ● [ann,rnm/sf](#)

Rachmat Gobel Dorong Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Perbatasan



FOTO: AZKA/NIL

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel saat meninjau PLBN Aruk.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Tentang Pembangunan

Daerah Perbatasan DPR RI (Timwas Perbatasan) Rachmat Gobel mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sebagai salah satu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat hingga ke pelosok Indonesia.

"Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai episentrum pengembangan kawasan perbatasan negara dan juga pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai gerbang terdepan wajah Indonesia," kata Gobel dalam pertemuan dengan Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (BNPP) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan pihak terkait lainnya di Kantor PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (12/8).

Menurut Gobel, dalam mewujudkan harapan ini, semua pihak, baik BNPP, pemda dan kementerian terkait harus saling kerja sama dan komunikasi yang terus-menerus agar dapat menyelesaikan kendala di lapangan. "Sebagai Ketua Timwas Perbatasan DPR RI, saya akan terus mengawasi dan memonitor seluruh kegiatan di wilayah perbatasan, khususnya kehidupan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat setempat," jelasnya.

Khusus beberapa sarana dan prasarana yang dalam tahap pembangunan, seperti gudang, pasar maupun jembatan di wilayah perbatasan, Gobel memberikan pesan khusus kepada jajaran.

Pemerintah Kabupaten Sambas dan perwakilan pedagang yang hadir dalam pertemuan tersebut, jika ada anggaran yang menemui kendala dalam pengajuan ke pemerintah pusat agar disampaikan, sehingga semuanya akuntabel dan transparan.

Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu pun bersedia menjembatani komunikasi antara pemda di daerah perbatasan dengan beberapa kementerian terkait, agar kendala yang ada dapat diatasi dan pembangunan yang terhambat dapat kembali berlanjut.

Dalam pertemuan itu, Sekda Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar menyampaikan beberapa aspirasi, di antaranya pembangunan Rumah Sakit Vertikal di Kabupaten Sambas. Serta progres pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun ahun 2021. ● azk/sf

Scan QR untuk berita selengkapnya



Punya Potensi dan Energi Besar, Gus Muhaimin Minta Negara Genjot Stimulus Bagi Anak Muda



FOTO: WILGA/NVL

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat rangkaian Kongres ke-20 IPNU dan Kongres ke-19 IPPNU.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta negara untuk berperan aktif memberikan stimulus kepada generasi muda Indonesia. Gus Muhaimin, menilai generasi muda Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi jumlah, kemampuan serta energi yang bisa membawa perubahan. Hal tersebut disampaikan Gus Muhaimin pada *stadium general* yang merupakan rangkaian Kongres ke-20 IPNU dan Kongres ke-19 IPPNU, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (12/8).

"Jumlah kaum muda kita ini begitu besar dan tentu saja potensinya adalah energi. Mereka punya tenaga, mereka punya pemikiran dan otak yang masih *fresh* tinggal ada dua pola yang harus kita manfaatkan yang pertama percepatan kematangan dan yang kedua semua sektor perlu tenaga dan energi," ungkap politisi

yang aktif di berbagai organisasi kepemudaan ini pada saat menjadi mahasiswa ini.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut, percepatan kematangan generasi muda berkaitan dengan kualitas dan memiliki dua syarat utama yaitu: *skill* dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, Gus Muhaimin mendorong Pemerintah Indonesia untuk merancang program-program jangka pendek untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan muda.

"Kita perlu perguruan tinggi, tapi itu terlalu lama. Harus ada program-program instan misal setahun untuk meningkatkan (kualitas) SDM kita untuk mengisi tahun berikutnya. Nah ini, Kementerian Pendidikan juga harus menyiapkan satu modul bagaimana S1 aplikatif tahun berikutnya," jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut

setelah acara berlangsung.

Saat yang sama, Gus Muhaimin juga mengingatkan, generasi muda yang berkualitas dapat berkontribusi untuk mengisi seluruh sektor. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan stimulus dari pemerintah agar generasi muda tanah air bisa mengembangkan potensinya. Menurutnya, pemerintah dapat berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan sebagai perantara untuk merangkul dan memberikan dukungan bagi anak-anak muda.

"Masukkan (anak muda ke) semua sektor. Anggaran negara diperbanyak untuk memberi stimulus bagi kaum muda untuk bergerak. Jadi, organisasi-organisasi pemuda harus disuntik anggaran besar, diberi beasiswa yang banyak, organisasi-organisasi pemuda juga harus diberi ruang untuk berekspres, seni budaya teknologi, start up banyak lah," tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII ini. ● **uc/sf**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Legislator Tolak Usulan Revisi UU TNI yang Perbolehkan Isi Jabatan Sipil

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut

Binsar Pandjaitan sebelumnya dikabarkan mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengatur penempatan tentara di jabatan-jabatan kementerian. Usulan tersebut akan disampaikan bersamaan dengan usulan revisi

dan Investasi merevisi UU TNI agar tentara aktif bisa kembali menduduki jabatan sipil, sama saja dengan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang memperbolehkan anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil.

"Kita harus menjaga semangat reformasi agar tidak sampai

kembali ke era sebelumnya di mana adanya dwi fungsi ABRI," kata Dave dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (16/8).

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, rencana yang diusulkan agar perwira TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil saat ini tak lebih penting dari kebutuhan untuk menjaga profesionalitas. Dave memahami dalam beberapa tugas, kementerian atau lembaga negara membutuhkan profesionalitas dan model kepemimpinan TNI.

Namun, keperluan itu tak lebih mendesak daripada kebutuhan untuk tetap memelihara supremasi sipil. "Akan tetapi yang paling penting harus tetap dijaga adalah supremasi sipil dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda demokrasi yang hidup di Indonesia," kata Dave. ● **tn/aha**

”

AKAN TETAPI YANG PALING PENTING HARUS TETAP DIJAGA ADALAH SUPREMASI SIPIL DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN DAN RODA DEMOKRASI YANG HIDUP DI INDONESIA

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno.

UU TNI yang akan diserahkan pemerintah ke DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai usulan Menko Kemaritiman



FOTO: RUNI/NVL

Wacana Kampanye di Kampus, Rifqinizamy Karsayuda: Perlu Diperjelas dalam PKPU

Anggota Komisi II DPR RI RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya menyambut baik usulan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dengan memperbolehkan kampanye di kampus pada perhelatan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang. Menurutnya, hal ini nantinya perlu diperjelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Di dalam Undang-Undang tentang Pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017, itu kan yang dilarang adalah menggunakan fasilitas pendidikan. Sehingga kemudian kita akan perjelas ini nanti di dalam PKPU," jelas Rifqi sapaan akrabnya, saat ditemui **Parlementaria** sesaat sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Diketahui, berdasarkan UU Pemilu, yang dilarang adalah penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Untuk itu, menurut Rifqi, pembahasan diperbolehkannya kampanye kampus dalam PKPU



Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

FOTO: DOK/NWL

ini dianggap penting untuk memperjelas dan memberikan kanalisasi bagi kampus agar mahasiswa menjadi lebih efektif dalam menyampaikan aspirasinya.

”

DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILU, UU NOMOR 7 TAHUN 2017, ITU KAN YANG DILARANG ADALAH MENGGUNAKAN FASILITAS PENDIDIKAN. SEHINGGA KEMUDIAN KITA AKAN PERJELAS INI NANTI DI DALAM PKPU

"Agar kemudian kampus sebagai salah satu tempat diskursus tentang demokrasi selama ini berjalan, itu justru kita berikan kanalisasinya. Kalau kita tidak berikan kanalisasi maka kampus nanti akan terus mencari jalan untuk menyampaikan aspirasinya yang justru nanti tidak terlalu produktif," jelas politisi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Rifqi juga mengatakan Komisi II akan segera menjadwalkan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu untuk membahas wacana kampanye di kampus ini lebih jauh. "Dalam waktu dekat tentunya akan memanggil KPU dan Bawaslu untuk membahas mengenai pengawasan *plus* akan menyusun PKPU yang baru terkait hal itu," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I tersebut. ● **we/sf**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi III Soroti Over Kapasitas Lapas di Jambi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh beserta Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI menyoroti tingginya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Provinsi Jambi. Pangeran menyebut bahwa secara keseluruhan, *over* kapasitas lapas di Jambi mencapai 106 persen, dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Kelas IIA Jambi sebesar 1.396 dari kapasitas yang hanya 417 orang.

"Jadi hasil kunjungan kerja hari ini bersama Kakanwil Kumham, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan TUN Jambi, kawan-kawan (Anggota Komisi III DPR RI) banyak menanyakan terkait *over capacity* lapas, dimana dari laporan Kakanwil Kumham, *over*

kapasitasnya luar biasa mencapai 106 persen," ungkap Pangeran usai memimpin rapat dengar pendapat Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Ketua Pengadilan TUN Jambi, di Jambi, Kamis (11/8).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, legislator dari Kalimantan Selatan ini meminta agar aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan dapat menerapkan keadilan restoratif untuk mengurangi beban Lapas. Ia menekankan agar aparat penegak hukum dapat selektif dalam menetapkan kasus yang perlu dihukum penjara, agar jangan sampai kasus dengan kerugian yang kecil namun dihukum penjara

hingga satu tahun lebih dan juga membebani APBN untuk membayar biaya perkara.

"Nah dari *over capacity* ini dari kawan-kawan (Anggota Komisi III DPR RI), dimintakan kalau ada persoalan ringan yang sudah disidik Kepolisian bisa diterapkan *restorative justice* di Kepolisian, dan ini juga berlaku untuk yang lain termasuk kalau sudah di Pengadilan ya. Kita harapkan Pengadilan juga menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Dirjen Badilum terkait dengan penerapan *restorative justice*. Jangan sampai persoalannya ringan, kerugiannya kecil, cuma 100 ribu tapi orang itu dihukum 1-1,5 tahun," tegas politisi PAN itu.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Kepala Kanwil Kumham Provinsi Jambi Tholib menjelaskan terdapat 10 Lapas dan 1 LPKA di provinsi Jambi. Dari 11 Lapas tersebut, dapat menampung sebanyak 2.410 warga binaan. Namun, Tholib menjelaskan, saat ini jumlah warga binaan di Jambi mencapai 4.913 orang, sehingga terjadi *over* kapasitas sebanyak 2.558 orang. Jumlah perbandingan antara petugas dengan warga binaan pun mencapai 1:35 dari rasio ideal yakni 1 petugas berbanding 20 warga binaan. • **nap/sf**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat dengar pendapat Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan mitra kerja di Jambi.

Apresiasi Penghargaan Swasembada Beras, Komisi IV Dorong Pemerintah Indonesia Fokus Bangun Ketahanan Pangan



FOTO: DOK/NVL

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono mengapresiasi prestasi Pemerintah Indonesia yang memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) terkait swasembada pangan, beberapa waktu yang lalu. Tidak ingin cepat berpuas diri, sebagai negara yang berhasil melakukan swasembada beras, dirinya mendorong Pemerintah Indonesia untuk tetap fokus membangun ketahanan pangan Indonesia demi membangun kekuatan menghadapi

krisis pangan global.

"Akibat gejolak geopolitik dan juga pandemi Covid-19, tentu menimbulkan banyak sekali tantangan, khususnya ketahanan pangan di seluruh wilayah negara Indonesia. Memperoleh prestasi sebagai negara yang berhasil swasembada beras, tentu, kita patut apresiasi. Perlu dicatat, Indonesia masih impor untuk pada beberapa komoditas seperti kedelai, gandum dan lainnya. Ini patut kita soroti dan dicari solusinya," tutur Budi, sapaan akrabnya kepada **Parlementaria** usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI

dan Sidang Bersama DPR RI-DPRD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Sehingga, Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) DPR RI itu meminta agar seluruh mitra kerja Komisi IV DPR RI, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), agar tidak berhenti beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa dua hal tersebut, menurut Budi, akan sulit Indonesia menerapkan diversifikasi pangan yang mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Di sisi lain, ia juga menyoroti dukungan anggaran terhadap dua kementerian tersebut. Berdasarkan informasi yang dirinya telah terima, anggaran Kementan dan KKP tidak mencapai kurang dari 1 persen dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang sebesar Rp3,041 triliun.

"Jangan lupa, masalah pangan tidak hanya di dunia pertanian saja tetapi juga perikanan. Ini catatan, bahwa kita ini kan menghadapi krisis pangan. Kita harus mempunyai langkah-langkah khususnya postur anggaran yang adaptif terhadap kondisi ini. Semoga kita bisa memperjuangkan anggaran yang lebih berpihak demi mewujudkan ketahanan pangan," terang legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur tersebut. • **ts,adi/sf**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya





Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza saat ditemui sebelum mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.

Komisi VI Akan Bahas Persoalan BBM Bersubsidi dengan Pertamina

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan Komisi VI DPR RI akan memanggil jajaran direksi PT Pertamina pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 mendatang untuk mendapatkan penjelasan mengenai strategi yang akan dilakukan Pertamina berkaitan dengan meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi imbas dari naiknya harga BBM non-subsidi.

"Kita ingin Pertamina menjelaskan apa langkah yang

sedang diantisipasi sejauh ini. Cuma memang ini kejadian di seluruh dunia ya, kita prihatin tapi kita tidak boleh kalah dengan krisis atau resesi yang ada," ujar Faisol sebelum mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Lebih lanjut, terkait adanya kemungkinan naiknya harga BBM bersubsidi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, Komisi VI DPR RI akan menghitung terlebih dahulu sejauh mana efek kenaikan harga tersebut terhadap

inflasi. "Banyak yang sudah meminta kenaikan harga pertalite, tapi kita masih menghitung sejauh mana tentunya efek terhadap inflasi," imbuh Faisol.

Menurut Faisol, faktor inflasi penting untuk diperhitungkan, sebab akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi di tengah krisis yang sedang terjadi. "Inflasi bukan sepenuhnya jelek ya, tapi kita ingin daya beli masyarakat tetap ada, kita juga tidak ingin itu memicu kenaikan yang gila-gilaan terhadap barang kebutuhan pokok," ungkap legislator dapil Jawa Timur II tersebut.

Untuk itu Faisol berharap, apapun nanti solusi yang dilakukan, akan tetap bisa menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Sebelumnya dalam kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya tidak akan menyetujui tambahan subsidi BBM oleh pemerintah tahun ini. Untuk itu, pemerintah diminta mencari solusi lain untuk menyalasi kenaikan harga minyak dunia. • **bia/sf**

Pemerintah Harus Awasi Anggaran Subsidi yang Terus Membengkak

Pemerintah menganggarkan dana subsidi sebesar Rp502 triliun dalam pengantar RAPBN 2023. Anggaran subsidi tersebut mayoritas digunakan untuk mensubsidi sektor energi. Dengan besarnya alokasi anggaran subsidi tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengingatkan pemerintah harus lebih ketat mengawasi distribusi barang subsidi.

"Memang anggaran subsidi kita sangat besar, yaitu Rp502 triliun. Namun, bukan tidak mungkin anggaran ini kembali membesar apabila pemerintah tidak dapat mengawasi pendistribusiannya. Di

sinilah urgen bagi pemerintah untuk fokus pada revisi Perpres BBM, agar subsidi jatuh kepada masyarakat yang berhak," kata Sartono saat diwawancara *Parlementaria* lewat pesan teks, Selasa (16/8).

Ditambahkan politisi Partai Demokrat itu, saat ini masyarakat sudah merasakan lonjakan harga pangan dan energi yang sangat tinggi. Saat yang sama ekonomi masyarakat baru berangsur membaik dari pengaruh pandemi Covid-19. "Kenaikan LPG dan BBM nonsubsidi juga semakin membuat tekanan ekonomi bagi masyarakat.

Sudah seharusnya Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi dan fokus merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran BBM, sehingga subsidi yang dikeluarkan menjadi tepat sasaran," tandas Sartono.

Pemerintah, lanjut legislator dapil Jawa Timur VII itu, harus mengatur skala prioritas dalam melaksanakan proyek pembangunan. Menurut Sartono, pemerintah sebaiknya menunda sejumlah proyek yang menggunakan anggaran besar dan mengalokasikan anggaran tersebut untuk subsidi maupun program yang dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

"Konflik Rusia-Ukraina membuat harga minyak dan gas bumi semakin melambung. Harga minyak yang tinggi ini membuat inflasi juga melonjak. Indonesia memang negara penghasil migas, namun lapangan migas kita sudah sangat tua, dan memiliki penurunan tingkat produksi yang besar. Oleh karena itu, transisi energi dengan menggunakan energi terbarukan menjadi solusi yang tepat, agar Indonesia tidak bergantung dengan energi fosil," tutup Sartono.

● mh/aha



Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo.

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: AZKA/NVL

Lembaga Filantropi Selewengkan Dana, Iskan Lubis: Ada Kelemahan Regulasi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 yayasan filantropi diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis kasus yang menimpa ACT dan lembaga serupa lainnya terjadi karena adanya kelemahan regulasi.

Untuk itu, Iskan mendorong revisi Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

"Perlu disempurnakan regulasi yang mengatur pengumpulan donasi masyarakat, baik berupa uang maupun barang, karena regulasi yang ada saat ini sudah tidak relevan

dengan situasi yang ada saat ini," kata

Iskan sebelum mengikuti

Sidang Bersama DPR

RI-DPD RI

di Gedung

Nusantara,

Senayan,

”

**PERLU
DISEMPURNAKAN
REGULASI YANG
MENGATUR
PENGUMPULAN
DONASI MASYARAKAT,
BAIK BERUPA UANG
MAUPUN BARANG**

Jakarta, Selasa (16/8).

Beberapa hal yang perlu direvisi, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengenai transparansi, akuntabilitas hingga kontrol publik dan pemerintah terhadap pengumpulan uang dan barang. "Kalau tidak segera diperbaiki, ini akan merugikan masyarakat, karena pengawasannya itu tidak jalan. Saya mendukung Menteri Sosial membentuk timsus untuk melakukan pengawasan terhadap izin lembaga filantropi dan penyaluran bansos," kata Iskan.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengatakan akan membentuk timsus untuk melakukan pengawasan terkait izin lembaga filantropi dan penyaluran bansos. Timsus akan diisi jajaran Kemensos, Bareskrim Polri, Kejaksaan, PPATK, KPK, BPKP, Kemenkumham, dan Kominfo. "Timsus yang terdiri atas sejumlah lembaga itu tak hanya bertugas mengawasi, tapi juga mengkaji ulang semua regulasi," tutup Iskan. • rnm/sf

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis.

FOTO: ERMAN/NVL

Nihayatul Wafiroh Imbau Pemerintah Gencarkan Sosialisasi Penanganan Cacar Monyet

Wakil Ketua
Komisi IX DPR
RI Nihayatul
Wafiroh
mengimbau

jajaran Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk gencar melakukan sosialisasi mengenai penanganan dan pencegahan penyakit cacar monyet. Hal tersebut diungkapkannya terkait dengan merebaknya wabah cacar monyet atau di beberapa negara termasuk Singapura.

"Lagi-lagi saya mengimbau untuk harus dilakukan sosialisasi. Jadi Kementerian Kesehatan harus menyiapkan obatnya, lalu juga infrastruktur yang ada di rumah sakit dan Puskesmas. Yang penting lagi tentang sosialisasi, sehingga masyarakat tahu bagaimana melakukan pencegahannya dan apa yang harus mereka lakukan jika mereka kena," ungkap Ninik, sapaan akrab Nihayatul, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (15/8).



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.

FOTO: DOK/NVL

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, sosialisasi diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid di antara pemberitaan yang cenderung menimbulkan ketakutan. Ninik juga mencontohkan akibat kurangnya sosialisasi di masa awal pandemi Covid-19 yang menimbulkan stigma dan diskriminasi pada orang yang terjangkit penyakit tersebut.

"Nah itu yang saya selalu sampaikan, jangan sampai masyarakat hanya dijejali dengan informasi-informasi yang menakutkan tapi mereka tidak tahu mau *ngapain*. Selain itu, sama seperti saat Covid mereka dijejali dengan berita Covid yang luar biasa (menyeramkan) tapi mereka

tidak tahu kalau kena mau *ngapain*? Sehingga yang terjadi waktu awal Covid, ada diskriminasi yang luar biasa, stereotipe yang luar biasa terhadap orang yang kena Covid. Nah itu jangan sampai terjadi ketika persoalan (cacar monyet) ini (muncul di Indonesia)," lanjut Ninik.

Kementerian Kesehatan belum mengumumkan adanya kasus cacar monyet di Indonesia, meski telah terindikasi adanya sejumlah suspek di berbagai daerah sejak Juni 2022 belum ada yang dinyatakan positif berdasarkan hasil tes PCR. Dengan persebarannya yang masif di beberapa negara, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan menyatakan bahwa cacar monyet sebagai darurat kesehatan internasional. • **uc/sf**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menilai kampanye politik di kampus menjadi sebuah pendidikan politik yang baik, bagi para mahasiswa yang notabene sebagai generasi penerus dan calon pemimpin bangsa. Apalagi indikator Pemilu yang berkualitas juga ditentukan oleh keberhasilan pendidikan politik di tengah masyarakat.

"Saya mendambakan Pemilu tahun 2024 nanti menjadi Pemilu yang berkualitas. Salah satu indikatornya Pemilu 2024 itu berkualitas adalah bisa menjadi pendidikan politik bagi semuanya. Oleh karena itu, jika undang-undang atau aturannya mengizinkan kampanye di dalam kampus, saya melihat hal itu langkah yang sangat baik dalam rangka edukasi," ujar Zainudin Maliki sesaat sebelum mengikuti

Sidang Tahunan
MPR RI dan
Sidang
Bersama
DPR RI-DPD
RI di Gedung
Nusantara,
Senayan,
Jakarta,
Selasa (16/8).

Dijelaskan
Anggota Komisi
yang membidangi
masalah

Legislator Nilai Kampanye Politik di Kampus Bisa Jadi Pendidikan Politik yang Baik

pendidikan ini, dengan adanya kampanye di dalam kampus, maka akan muncul pikiran-pikiran, serta gagasan-gagasan akademis yang tentunya didasarkan pada kajian-kajian akademik. Itu tentu akan memberi sumbangan bagi upaya dalam menjadikan Pemilu yang berkualitas, Pemilu yang bisa dijadikan pendidikan politik.

"Selama ini pemilu Kita melahirkan pembelahan di masyarakat, baik horizontal maupun pembelahan secara vertikal. Saya tidak ingin hal itu terulang kembali. Saya ingin satu Pemilu yang

bisa dijadikan pernikahan politik, serta pemilu yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang kuat, *the strong leader*. Pemimpin yang bisa membaca persoalan bangsa kita, kemudian bisa memilih jalan keluar yang benar-benar memang bisa menyelesaikan masalah bangsa ini," papar Zainuddin lebih lanjut.

Ditambahkan Anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini, jika kemudian saat pelaksanaan kampanye di dalam kampus terjadi ketidaknetralan, atau tidak adanya Pemilu yang jujur dan adil, hal itu juga merupakan bagian dari politik. Terutama kepada mahasiswa dan para akademisi di dalamnya, apakah mereka mampu mencermati secara kritis, jika ada kecenderungan indikasi-indikasi berbagai fakta yang bisa menghambat upaya kita membangun demokrasi yang ideal.

"Mahasiswa juga mendapat kesempatan untuk belajar, jadi sarjana yang bisa memberikan solusi bagi permasalahan bangsa ini. Sehingga saya meyakini kampanye politik menjelang Pemilu 2024 di dalam kampus itu akan menjadi bagian *legacy*, apakah dengan cara tersebut akan memberikan sumbangan bagi demokrasi yang kuat, demokrasi yang substansial, dan demokrasi yang ideal. Ini akan kita lihat nanti," pungkasnya. • ayu/aha

Anggota Komisi X DPR RI
Zainuddin Maliki.



FOTO: ERMAN/NVL



Tanggapi Pidato Presiden, Anis Byarwati: **Pemerintah Harus Fokus Benahi Inflasi dan Kesejahteraan Rakyat**

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberi catatan atas Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI. Adapun tema kebijakan fiskal yang diusung oleh Pemerintah pada tahun 2023 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Menurut Anis, perekonomian Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi pada tahun 2023. Karena itu, pemerintah harus fokus benahi inflasi dan kesejahteraan rakyat. "Pidato Presiden Joko Widodo tersebut menunjukkan tantangan ekonomi global yang tidak ringan, serta bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut," ujar Anis kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/8).

Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan mendasar yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu, Pemerintah perlu membuat skala prioritas terhadap proyek pembangunan yang berskala besar.

Selain itu, jelasnya, Indonesia juga masih memiliki masalah struktural yang seringkali menghambat jalannya pembangunan.

Di antaranya, lanjut Anis, kualitas sumber daya manusia yang rendah, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya produktivitas dan daya saing. "Serta, birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, serta belum bebas dari praktik moral hazard khususnya korupsi," jelas Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu.

Demikian pula target pertumbuhan ekonomi 2023 yang diperkirakan sebesar 5,3 persen. Menurut Anis, hal itu akan sangat sulit untuk dicapai. Hal ini tidak lepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II Tahun 2022 lebih banyak ditopang oleh terjadinya windfall akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar

internasional. "Diperkirakan windfall tersebut akan segera berakhir pada tahun 2023," kata Anis.

Bahkan lembaga International Monetary Fund (IMF), tambah Anis, memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen di tahun 2022 dan 2,9 persen di tahun 2023. "Pemerintah harus bisa mempertahankan kinerja ekspor dan meningkatkan laju investasi dan tingkat konsumsi masyarakat

untuk bisa mencapai target angka pertumbuhan tersebut," ujarnya. •
rdn/sf

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.



FOTO: MUNICHEN/ANL

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua BURT Yakin RS Dian Harapan Mampu Tangani Pasien VVIP

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan apresiasi atas kesiapan Rumah Sakit (RS) Dian Harapan di Abepura, Papua dalam memberikan pelayanan terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) VVIP, dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya. Menurut Agung, RS tersebut memiliki keunggulan pelayanan tersendiri khususnya terkait pengobatan, mata, hal itu pun menjadi nilai positif bagi RS Dian Harapan.

"Karena rumah sakit yang menjadi mitra Jasindo (operator program Jamkestama) harus paham betul, dan kami BURT memastikan bahwa rumah sakit yang menjadi mitra Jasindo itu betul-betul mengerti terhadap bagaimana memberikan pelayanan kepada para Anggota DPR RI beserta keluarganya," ucap Agung dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan manajemen RS Dian Harapan, di Abepura, Papua, Selasa (9/8).

Politisi Partai Demokrat tersebut juga menyampaikan perlunya BURT DPR RI untuk mengetahui dan memastikan bahwa RS yang bermitra dengan Jasindo benar-benar siap apabila sewaktu-waktu

menerima pasien VVIP. Tak hanya itu, Agung turut mengingatkan agar Jasindo memiliki hubungan yang baik dengan RS yang bermitra dengan Jasindo.

"Jangan sampai hubungan antara Jasindo dan RS mitra buruk, contoh sudah melakukan pelayanan yang baik, kemudian kan melakukan penagihan, Jasindo bayarnya telat, bayarnya lama. Nah tentunya ini akan memberikan

pengaruh pada pelayanan terhadap Anggota DPR sebagai pemegang Jamkestama VVIP," jelas Agung.

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Barat I itu mengungkapkan konsep *green hospital* yang dimiliki RS Dian Harapan sudah cukup bagus. Menurutnya, hal itu akan memberi dampak bagus bagi psikis pasien, sehingga akan turut mempercepat kesembuhan.

Agung meyakini RS Dian Harapan akan mampu memberikan pelayanan perawatan maksimal kepada pasien VVIP. Meski masih RS Kelas C, RS Dian Harapan dinilai Agung memiliki alat-alat yang cukup lengkap. Sehingga apabila sewaktu-waktu ada pasien VVIP memerlukan perawatan di RS

tersebut, Agung yakin

RS Dian Harapan dapat dengan sigap melakukan penanganan. ●

srw/sf

**Ketua BURT DPR RI
Agung Budi Santoso.**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: FITRI/NVL

Achmad Dimiyati Apresiasi Perkembangan Kualitas Layanan RS Murni Teguh Medan



FOTO: RIZKI/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah saat memimpin Kunker BURT DPR RI ke RS Murni Teguh.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mengapresiasi perkembangan seluruh fasilitas dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit (RS) Murni Teguh Medan, pasca kunjungan terakhir BURT DPR RI ke RS tersebut beberapa tahun lalu.

"Kunjungan BURT ke Rumah Sakit Murni Teguh Medan sebenarnya dalam rangka melakukan evaluasi. Kita sudah pernah ke sini beberapa tahun yang lalu dan ternyata perkembangan pelayanannya luar biasa," kata Dimiyati usai memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau fasilitas RS Murni Teguh di Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/9).

Dimiyati mengatakan

perkembangan tersebut ditunjukkan dari kelengkapan dan tersedianya sejumlah peralatan kesehatan modern yang ada di RS Murni Teguh Medan. Selain itu ia juga melihat kemampuan RS ini dalam memberikan berbagai pelayanan kesehatan, karena telah memiliki spesialisasi penyakit jantung dan kanker. "Rumah Sakit Murni Teguh sudah memiliki peralatan radiologi, fisioterapi, *CT Scan* dan lain sebagainya yang sudah modern serta di sini spesialisasinya di bidang jantung dan juga di bidang kanker," ungkapnya.

Hal tersebut juga ia nilai sebagai tanda perkembangan kualitas RS di Indonesia sudah sangat baik, dan tidak kalah dari sejumlah RS yang ada di negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. "Saya nilai (RS Murni Teguh) ini sangat mumpuni, untuk perkembangan rumah sakit yang

ada di Indonesia dan tidak kalah rumah sakit ini dengan rumah sakit yang ada di Malaysia maupun yang ada di Singapura," ujar Dimiyati.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyimpulkan bahwa seluruh aspek yang dimiliki RS Murni Teguh Medan mulai dari manajemen, pelayanan hingga kamar sudah sangat bagus. "Saya lihat manajemen bagusnya, pelayanannya bagus, perkembangan rumah sakit bagus, peralatannya bagus, hingga kamar juga bagus," tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Banten I tersebut.

Oleh karena itu, Anggota Komisi III DPR RI tersebut merekomendasikan RS Murni Teguh sebagai rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, baik untuk penyakit serius seperti jantung, stroke dan kanker, maupun hanya *general check up*. ● **rr/sf**

Kawal PMN BUMN Pangan, PKA DPR Gelar FGD dengan ID Food



FOTO: PRIMA/NVL

Kepala Pusat Kajian Anggaran BK Setjen DPR RI Helmizar bertukar cenderamata dengan ID Food.

Pusat Kajian Anggaran (PKA) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI DPR RI menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) membahas 'Efektivitas Pemberian PMN bagi BUMN Guna Mendukung Ketahanan Pangan' dengan sejumlah BUMN Pangan. Pasalnya, pemberian PMN sebesar Rp2 triliun kepada BUMN Pangan perlu dikawal dengan sebaik-baiknya oleh seluruh *stakeholder*, termasuk DPR RI agar implementasi sesuai dengan tujuan. Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran

Helmizar saat membuka FGD di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (12/8). Dirinya menekankan pemberian tambahan PMN tersebut diharapkan bisa meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki struktur permodalan, hingga memluas kemampuan pendanaan BUMN.

"Selaku *agent of value creator* dan *agent of development*, BUMN hadir sebagai bagian dari pembangunan Indonesia. Untuk itu, pemerintah memberikan dukungan alokasi pembiayaan anggaran melalui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digunakan untuk mendukung

agenda program prioritas nasional," tutur Helmizar di hadapan puluhan para tenaga ahli DPR RI.

Lebih rinci, ia memaparkan berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI bersepakat menyetujui usulan PMN BUMN tahun 2023 sebesar Rp73,2 triliun dimana ID Food mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp2 triliun. Rencananya, tambahan PMN digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, meningkatkan inklusivitas petani, peternak dan nelayan, serta menjadi perusahaan pangan berkelas dunia.

Walaupun begitu, Helmizar menyampaikan sejumlah catatan agar tambahan PMN yang diberikan nantinya bisa diserap secara efektif sekaligus maksimal. Di antaranya PKA DPR RI menyarankan agar pemerintah menetapkan KPI kepada ID Food selaku holding BUMN pangan agar setiap program kerja yang dilaksanakan bisa terukur, dan komprehensif.

Selain itu, BK DPR RI meminta ID Food sebagai penerima PMN bersama pemerintah menyusun indikator berdasar *Total Impact Measurement and Management* (TIMM) yang terdiri dari 4 aspek dampak yaitu dampak sosial, dampak lingkungan, dampak perpajakan dan dampak ekonomi. Terakhir, dirinya berpandangan BUMN Pangan harus melakukan bisnis setiap sektor pangan secara terintegrasi (hulu-hilir). Tentu saja, hal ini vital supaya ketahanan pangan yang dicita-citakan oleh Indonesia terwujud nyata.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai Penyertaan Modal Negara pada ID Food yang diperlukan untuk penyusunan kajian. Kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Anggota Dewan Komisi VI DPR RI," tandas Helmizar. • **ts/aha**





Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Setjen DPR RI.

Sekjen DPR Ajak Pegawai **Maknai** Hari Kemerdekaan dengan Karya dan Perubahan

Setelah dua tahun diadakan secara virtual, untuk pertama kalinya Sekretariat Jenderal DPR RI kembali melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri secara fisik oleh pejabat dan pegawai di halaman Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (17/8). Upacara dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar selaku Inspektur Upacara.

"Sudah bukan zamannya lagi kita bekerja secara *business as*

usual, apalagi lembaga tempat kita mengabdikan adalah lembaga politik yang sangat dinamis dan penuh dengan tantangan. Sebagai ASN yang bekerja di lembaga politik, kita harus mampu menjadi *supporting system* baik melalui dukungan persidangan, dukungan administrasi maupun dukungan keahlian sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing," ujar Indra.

Kepada **Parlementaria**, Indra mengungkapkan dengan adanya fasilitas yang telah diberikan oleh negara, maka ASN sudah sepatutnya bisa berkarya sungguh-sungguh.

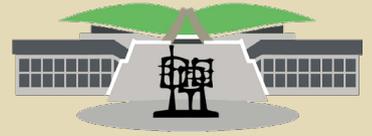
la juga menambahkan bahwa tantangan yang akan dihadapi masa modern ini tentu berbeda dengan tantangan pada zaman sebelum kemerdekaan, oleh karena itu salah satu cara memperjuangkannya adalah dengan melahirkan karya untuk bangsa dan negara.

"Kita harus meningkatkan etos kerja, meningkatkan kompetensi supaya apa yang kita lakukan pada bangsa dan negara itu ada maknanya. Sekecil apa pun ada maknanya. Jadi itu yang menjadi refleksi bahwa setelah 77 tahun kita merdeka harus ada keyakinan untuk menjadi bagian dari perubahan, bagian yang mengubah situasi. Itu harus ada semangat dan keyakinan kepada diri kita," pesan Indra kepada seluruh peserta upacara.

Dalam upacara tersebut, Indra juga sempat menyinggung nilai-nilai dasar (*core value*) ASN yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021 lalu. Nilai dasar yang dikenal dengan BerAKHLAK tersebut terdiri dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif ini diharapkan bisa diamalkan oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. • **uc/sf**

Scan QR untuk berita selengkapnya





Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani serta Pimpinan DPR RI saat memasuki Ruang Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). FOTO: TIM/NVL



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Pidato Pengantar RAPBN 2023 dari Presiden Joko Widodo, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). FOTO: TIM/NVL



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri secara fisik oleh pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, di halaman Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (17/8). FOTO: WILGA/NVL

